

KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, disusun berdasarkan PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan PRJPD, RPJMD dan RKPD.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan acuan umum rencana dan kegiatan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait dengan pelayanan infrastruktur terdapat kesepahaman dalam mewujudkan infrastruktur jalan, cipta karya dan tata ruang yang berkelanjutan, dan diharapkan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini bermanfaat bagi kita.

Padang, Januari 2018

KEPALA DINAS

Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng

NIP. 19640515 199003 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya	19
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Barat	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD Provinsi Sumatera Barat.....	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	43
3.2. Telaahan Visi, Misi Program Gubernur dan Wakil Gubernur	44
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ...	47
3.4. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang.....	48
3.5. Keterkaitan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sumatera Barat dengan Visi dan Misi Kementerian PUPR dan Kementerian ATR	49
3.6. Telaahan RTRW Provinsi dan KLHS	49
3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	54

4.1.Tujuan dan Sasaran	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	63
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	64
6.1.Rencana Program dan Kegiatan	64
5.2.Indikator Kinerja	70
5.3.Pendanaan Indikatif.....	74
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	79
BAB VII PENUTUP	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010	3
Gambar 2. 1 Bagan Perbandingan Jumlah Pegawai Pria dan Wanita	14
Gambar 2. 2 Personil yang Memiliki Sertifikat Penjenjangan Karir 2009 dan 2014.....	16
Gambar 2. 3 Daftar Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2015.....	17
Gambar 3. 1 Peta Gagasan Pembentukan Struktur Ruang.....	50
Gambar 3. 2 Peta Pembangunan/Peningkatan Jalan Strategis.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rincian Pegawai	15
Tabel 2. 2 Personil yang Memiliki Sertifikat Keahlian Tahun 2009, 2014 dan 2015	15
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Tahun 2011-2015 Provinsi Sumatera Barat.....	30
Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Prasarana Tarkim Prov. Sumatera Barat Tahun 2010-2015	33
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD	57
Tabel 4. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD 2016-2021	61
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	76

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi PD.

Rencana Strategis (Renstra) PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah PD yang berfungsi untuk menterjemahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Selain itu, Renstra PD juga harus memuat sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Renstra memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Prasarana Jalan, Penataan Ruang dan Permukiman dibagi menjadi dua dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun renstra ini, merupakan revisi dari Renstra Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman 2016 – 2021, yang selanjutnya direvisi menjadi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016 – 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menyebutkan bahwa Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Hal inilah yang kemudian tertuang dalam Revisi Renstra Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021. Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

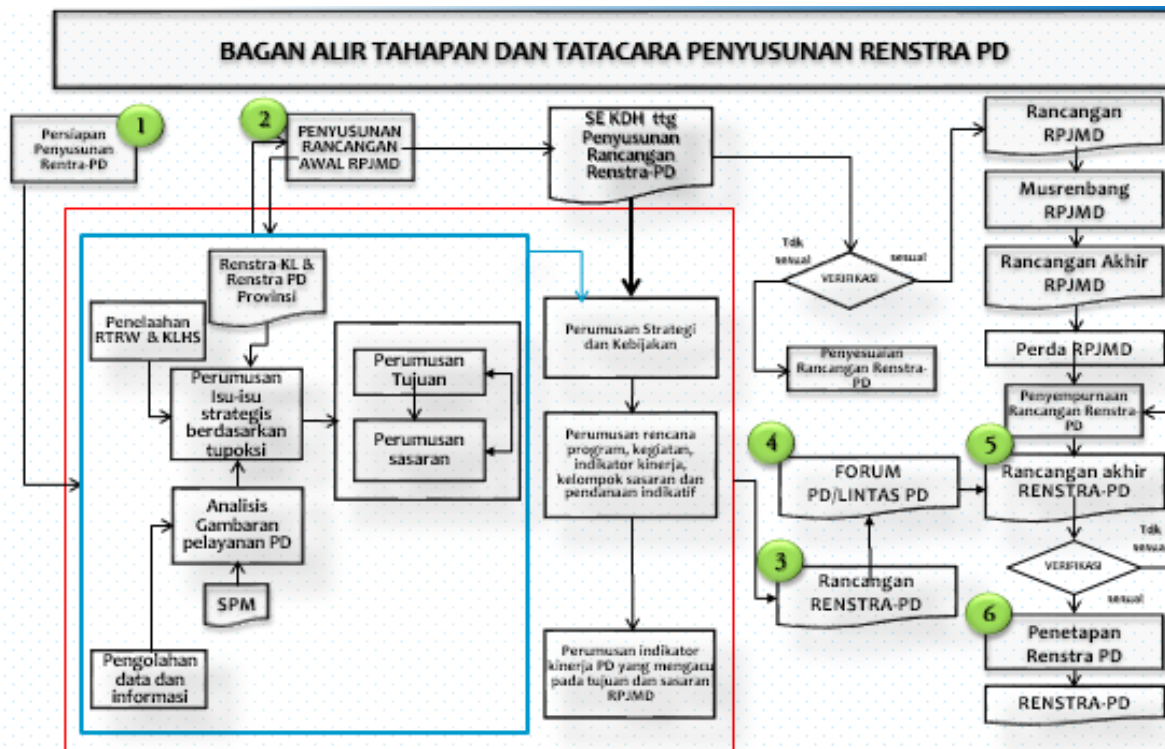
Proses penyusunan Renstra Dinas PU dan Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 –2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Secara rinci penyusunan dokumen Renstra dilakukan dengan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari:

1. Pengolahan data dan informasi
 - a. Data dan informasi gambaran pelayanan OPD; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan OPD; (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya; (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam lingkup kewenangan OPD.
 - b. Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan OPD: mencakup (1) data pendapatan OPD; dan (2) data belanja OPD.
2. Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri dari:
 - a. Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD;
 - b. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD.
3. *Review* Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) yang mencakup:
 - a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L khususnya Kementerian Pekerjaan Umum – Perumahan Rakyat (Kementerian PUPera);
 - b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:
 - a. Tujuan dan sasaran RTRW;
 - b. Struktur dan pola ruang;
 - c. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi OPD.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:
 - a. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD (potensi dan permasalahan pelayanan OPD);
 - b. Hasil review Renstra K/L;
 - c. Hasil penelaahan RTRW;
 - d. Hasil analisis dokumen KLHS;

- e. Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD;
7. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD; dan
8. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD.

Adapun Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas PUPR Tahun 2016 - 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1



Gambar 1. 1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra OPD
berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat dari bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 28/2002, tentang Bangunan Gedung
2. Undang-undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang No. 18/2004, tentang Jalan
5. Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
6. Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Undang-Undang No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Undang-Undang No. 26/ 2007, tentang Penataan Ruang
10. Undang-undang No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11. PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Daerah
12. PP No. 108/2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
13. PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
14. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
15. PP No. 15/ 2005, tentang Jalan Tol
16. PP No. 39/2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
17. PP No. 38/ 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota
18. PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
19. PP No. 26/ 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
20. Perda No. 4/2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat
21. Perda No. 13/2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-203
22. Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

23. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
24. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Permendagri 59/2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13/2006
26. Permendagri No. 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan PRJPD, RPJMD dan RKPD
27. Permen PU NO 02/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015-2019
28. Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
29. Instruksi Presiden No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
30. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 53/2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen induk perencanaan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
- b. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat secara nyata ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan, telaahan visi, misi dan program gubernur, telaahan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Telaah RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan serta harapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan OPD baru yang berasal dari Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman.

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu OPD yang lahir melalui Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. OPD ini merupakan unsur pelaksana bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor : 53 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, urusan wajib pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :

1. Urusan Pekerjaan Umum; dan
2. Urusan Penataan Ruang

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

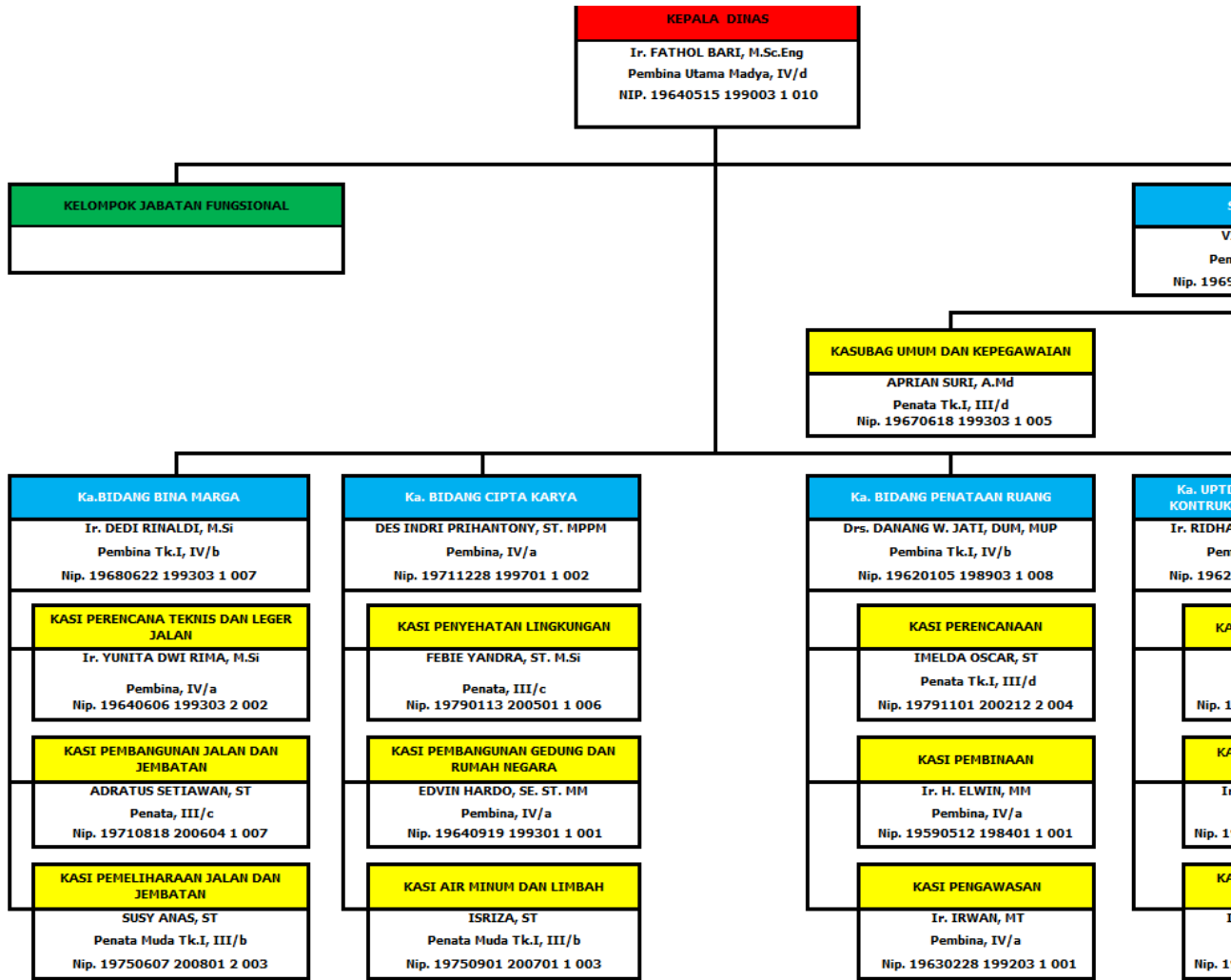
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang keciptakaryaan, kebinamargaan serta bidang penataan ruang;
- f. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang keciptakaryaan, bidang kebinamargaan serta bidang penataan ruang;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat tersebut, dibentuk susunan organisasi Dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Cipta Karya

- a. Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - c. Seksi Air Minum dan Limbah.
4. Bidang Bina Marga:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 5. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Penataan Ruang;
 - b. Seksi Pembinaan Penataan Ruang;
 - c. Seksi Pengawasan Penataan Ruang.
 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Arsip paris



2.1.4 Uraian Tugas dan Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibantu oleh Sekretariat, 3 (tiga) bidang dan 2 UPT dengan masing-masing uraian tugas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan serta penyelenggaraan pembinaan, pengendalian teknis pembangunan. Dengan rincian sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan di Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- Menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pelayanan administrasi dan pelaksanaan kegiatan yang ada pada sub bagian umum dan kepegawaian serta sub bagian keuangan dan program. Dengan rincian sebagai berikut :

- Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas;
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD dinas;
- Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dinas.

b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi sebagai berikut :

- pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas.

b.2. Sub Bagian Keuangan dan Program;

Sub Bagian Keuangan dan Program memiliki fungsi sebagai berikut :

- pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan dan Program; dan
- pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang keuangan dan program di lingkungan Dinas.

c. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan gedung dan rumah dinas, penyehatan lingkungan, serta air minum dan limbah, dengan rincian sebagai berikut :

- Menyelenggarakan program kerja dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- Menyelenggarakan fasilitasi keciptakaryaan;
- Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan keciptakaryaan;
- Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan keciptakaryaan;
- Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;

c.1. Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas

Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas.

c.2. Seksi Penyehatan Lingkungan

Seksi Penyehatan Lingkungan memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Penyehatan Lingkungan;
- Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyehatan Lingkungan; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyehatan Lingkungan.

c.3. Seksi Air Minum dan Limbah.

Seksi Air Minum dan Limbah memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Air Minum dan Limbah;
- Pelaksanaan kebijakan di Bidang Air Minum dan Limbah; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Air Minum dan Limbah.

d. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan rincian sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan teknis dan leger, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyelenggarakan koordinasi mengenai perencanaan teknis dan leger, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan perencanaan teknis dan leger, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;

d.1. Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;

Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan.

d.2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

d.3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

e. Bidang Penataan Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pada Seksi Perencanaan Penataan Ruang, Seksi Pembinaan Penataan Ruang, dan Seksi Pengawasan Penataan Ruang dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan penetapan Perdanya;
- Menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Peraturan Zonasi serta penetapan Perdanya;
- Menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan bidang tata ruang;

- Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penataan ruang antar kabupaten/kota;
- Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan perencanaan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pengawasan penataan ruang;

e.1. Seksi Perencanaan Penataan Ruang

Seksi Perencanaan Penataan Ruang memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Penataan Ruang; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penataan Ruang.

e.2. Seksi Pembinaan Penataan Ruang

Seksi Pembinaan Penataan Ruang memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penataan Ruang;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Penataan Ruang; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penataan Ruang.

e.3. Seksi Pengawasan Penataan Ruang.

Seksi Pengawasan Penataan Ruang memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Penataan Ruang;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Penataan Ruang; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Penataan Ruang.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 423 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagaimana pada diagram dibawah ini.



Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017, berdasarkan Jenis Kelamin.

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	318 orang	75,2%
Perempuan	105 orang	24,8%

Berikut merupakan tabel rincian Pegawai Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Tahun 2008 hingga 2015.

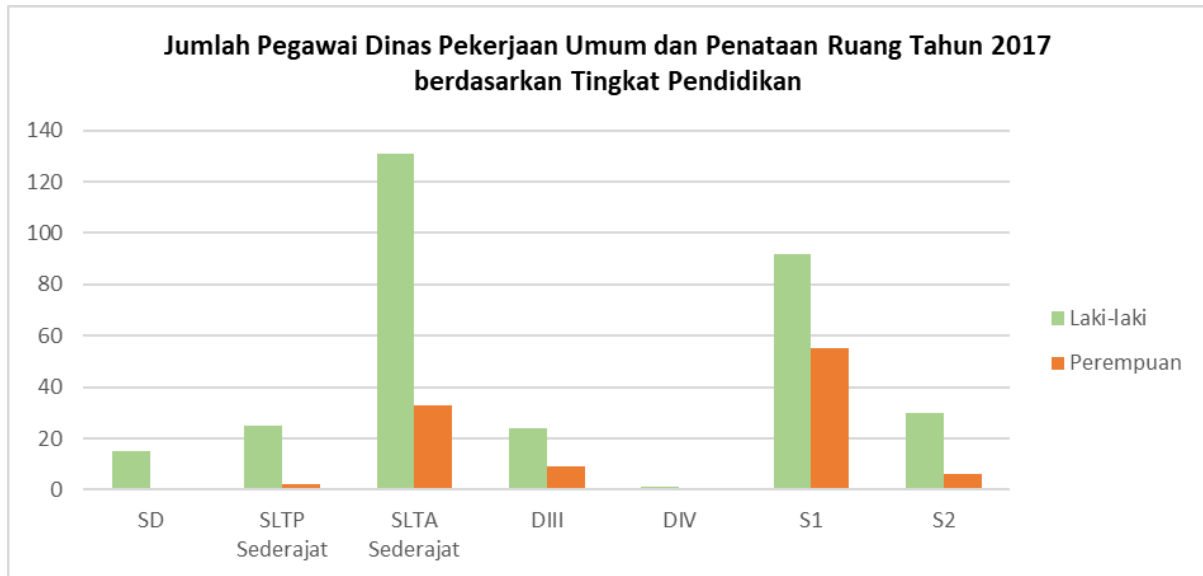
Tabel 2. 1 Rincian Pegawai

No.	RINCIAN PEGAWAI	JUMLAH (Orang)				
		2008	2009	2010	2014	2015
I.	JENIS KELAMIN	823	823	497	527	556
1.	Pria	554	554	359	387	401
2.	Wanita	269	269	138	140	155
II.	PENDIDIKAN					
1.	Pasca Sarjana (S-2)	52	52	37	37	31
2.	Sarjana	181	181	108	136	135
	S.1 (Teknis)	145	145	74	102	110
	S.1 (Non Teknis)	36	36	34	34	25
3.	Sarjana Muda	100	100	30	32	39
	D.3 (Teknis)	68	68	28	28	33
	D.3 (Non Teknis)	32	32	2	4	6
4.	SLTA	392	392	268	268	304
5.	SLTP	61	61	34	34	17
6.	SD	37	37	20	20	9
III	ESELON					
1.	II	1	1	1	1	1
2.	III	9	9	9	10	10
3.	IV	27	27	27	30	30

Sementara itu, pasca perubahan nomenklatur Dinas, pada Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	15	0	15
SLTP Sederajat	25	2	27
SLTA Sederajat	131	33	164
DIII	24	9	33
DIV	1	0	1

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
S1	92	55	147
S2	30	6	36
Jumlah	318	105	423



Sementara itu, dibagi berdasarkan golongannya, distribusi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 207 dapat dilihat sebagai berikut :

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1A	1	0	1
1b	3	0	3
1c	12	0	12
1d	8	0	8
2a	7	1	8
2b	34	0	34
2c	83	16	99
2d	8	4	12
3a	42	18	60
3b	42	36	78
3c	31	14	45
3d	25	12	37
4a	11	5	16
4b	8	0	8
4c	1	0	1
4d	1	0	1
4e	0	0	0

Untuk menunjang pelaksanaan seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibutuhkan tenaga profesional yg berkompeten yg memiliki sertifikat keahlian seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2
Personil yang Memiliki Sertifikat Keahlian Tahun 2009, 2014 dan 2015

No	Jenis Sertifikat Keahlian	Jumlah Pegawai (orang)		
		2009	2014	2015
1.	Pengadaan Barang dan Jasa	78	126	134
2.	Keahlian jalan dan jembatan	120	153	156
3.	Fungsional Teknis	135	168	177
4.	Pengujian laboratorium	0	17	25
5.	Manajemen Kebencanaan	0	48	53
6.	Pengelola Teknis Bangunan Gedung / Rumah Negara	15	21	21
7.	Brevet A dan B	42	68	74

2.2.2 Sumber Daya Non-Aparatur

1) Asset

Sumber Daya Non-Aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Asset yang berupa sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas.

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 PROVINSI : SUMATERA BARAT

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS (NILAI BUKU)

No Urut	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN (Rp.)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.)
				PERSIL	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01		GOLONGAN TANAH			477.440.674.020,00	0,00
		01	TANAH	99	13.347.169	477.440.674.020,00	0,00
2	02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			72.628.908.543,00	32.227.255.154,43
		02	ALAT-ALAT BESAR	-	82	37.593.913.009,00	14.794.659.019,40
		03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	-	41	8.781.966.236,00	3.857.323.611,00
		04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	61	162.093.380,00	118.743.948,00
		05	ALAT PERTANIAN	-	5	2.497.000,00	2.497.000,00
		06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	-	2.305	17.158.763.400,50	7.608.587.232,50
		07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	-	98	966.430.600,00	489.223.240,00
		09	ALAT LABORATORIUM	-	1.217	7.963.244.917,50	5.356.221.103,53
3	03		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			159.291.394.980,00	14.161.913.117,26
		11	BANGUNAN GEDUNG	67	6.620	158.488.142.890,00	14.113.717.991,86
		12	MONUMEN	3	0	803.252.090,00	48.195.125,40
4	04		GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARIN			3.101.143.999.698,71	2.601.200.511.056,95
		13	JALAN DAN JEMBATAN	-	171.439.054	3.068.490.733.166,71	2.598.244.522.291,42
		14	BANGUNAN AIR/IRIGASI	-	0	31.664.719.982,00	2.906.561.438,03
		15	INSTALASI	-	0	988.546.550,00	49.427.327,50
5	05		GOLONGAN ASET TETAP LAINYA			741.715.470.283,74	0,00
		18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	-	4	14.441.423.945,36	0,00
		20	ASET TETAP RENOVASI	-	461	727.274.046.338,38	0,00
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			232.533.713.082,00	0,00
		00	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	38	20	232.533.713.082,00	0,00
TOTAL HARGA						4.784.754.160.607,45	2.647.589.679.328,64
DIBULATKAN						4.784.754.160.607	2.647.589.679.329

Terbilang : Dua Triliun Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan

Gambar 2. 1 Daftar Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2015

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

Adapun kinerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman sebagai Dinas Induk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2010-2015 mengacu pada pencapaian atas indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut capaian atas indikator tersebut.

A. Meningkatnya Keterpaduan Penataan Ruang Wilayah

1. Tersedianya perencanaan tata ruang
2. Terlaksananya pembinaan penataan ruang
3. Terkendalinya pelaksanaan pemanfaatan rencana tata ruang
4. Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan rawan bencana
5. Terlaksananya review RTRW Provinsi Sumatera Barat
6. Terlaksananya revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat
7. Terlaksananya Penyusunan RTR kawasan Strategis Provinsi (KSP)
8. Terlaksananya proses legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
9. Terlaksananya kampanye publik penataan ruang melalui media massa
10. Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan bidang penataan ruang
11. Terlaksananya pendampingan revisi RTRW kabupaten/kota
12. Terlaksananya pendampingan legalisasi RDTR
13. Terlaksananya monitoring tata ruang Provinsi Sumatera Barat
14. Terlaksananya Pengawasan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumatera Barat

B. Meningkatnya Kemantapan Jalan

1. Prosentase jalan propinsi dalam kondisi mantap adalah tercapainya target peningkatan kemantapan jalan propinsi sebesar 10% dari kondisi tahun 2010 sebesar 65,93% menjadi 91,13 % pada tahun 2015.
2. Prosentase jalan nasional dalam kondisi mantap adalah tercapainya target peningkatan kemantapan jalan nasional sebesar 7% dari kondisi tahun 2010 sebesar 88% menjadi 95% pada tahun 2015.
3. Prosentase bertambahnya jalan baru sebesar 17% dibandingkan dengan total panjang jalan propinsi dengan total panjang 1230 km. Jalan baru

adalah pembukaan jalan-jalan baru atau pembangunan / peningkatan jalan yang dikerjakan pada jaringan jalan strategis propinsi maupun jaringan jalan strategis nasional.

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 S/D 2015**

DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Kategori	Satuan	Target		Indikator Out Put	Satuan	Total Target	Rencana Target					Realisasi				
		2010	2015				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
%		65,9	89,5	a1	KM	142	25	38	29	26	24	25	38	29	26	47,986
				a2	KM	5.373	1.035	1.027	1.025	1.143	1.143	1.035	1.027	1.025	1.143	1.143
				a3	M	355	-	165	9	16	165	-	165	9	16	30
				a4	M	848	134	203	192	174	145	134	203	192	174	146
				a.5	KM	177	18	36	31	65	27	18	36	31	65	14,303
				a6	M	1.853	273	425	251	679	225	273	425	251	679	60

**KONDISI JALAN PROVINSI DI SUMATERA BARAT
(Status Bulan Desember 2015)**

	KONDISI	TAHUN										
		2010		2011		2012		2013		2014		(KM) / M'
		(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(KM) / M'	(%)	(%)	(KM) / M'	(%)	
ANSI	MANTAP	996,77	83,78	966,77	83,78	1.016,49	88,09	886,90	87,77	1.085,32	88,20	1.121,00
	TDK MANTAP	187,17	16,22	187,17	16,22	137,45	11,91	123,60	12,23	145,21	11,80	109,00
	TOTAL Pj(Km)	1153,94	100,00	1.153,94	100,00	1.153,94	100,00	1.010,50	100,00	1.230,53	100,00	1.230,00
	MANTAP	6.621,91	89,43	6.630,69	90,87	6.596,20	90,40	6.514,94	90,33	6.574,19	91,15	6.582,00
	TDK MANTAP	674,80	10,57	666,06	9,13	700,55	9,60	697,56	9,67	638,31	8,85	630,00
	TOTAL Pj (M)	7.296,75	100,00	7.296,75	100,00	7.296,75	100,00	7.212,50	100,00	7.212,50	100	7.212,00

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
dengan Standar Nasional.
KONDISI JALAN NASIONAL DI SUMATERA BARAT
(Status Bulan Desember 2015)**

	KONDISI	TAHUN										
		2010		2011		2012		2013		2014		(KM) / M'
		(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(KM) / M'	(%)	(%)	(KM) / M'	(%)	

	KONDISI	TAHUN										
		2010		2011		2012		2013		2014		(KM) / M'
		(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(KM) / M'	(%)	(%)	(KM) / M'	(%)	
ONAL	MANTAP	619,47	51,07	1.094,93	90,27	1.119,83	92,38	1.119,83	92,38	1.170,98	96,54	1.224,
	TDK MANTAP	593,42	48,93	117,97	9,73	93,06	7,62	93,06	7,62	41,90	3,46	224,
	TOTAL Pj(Km)	1.212,89	100,00	1.212,89	100,00	1.212,89	100,00	1.212,89	100,00	1.212,89	100,00	1.448,

C. Meningkatnya Penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara

Pembangunan gedung negara sebanyak 27 unit selama rentang waktu 2010 – 2015, sehingga target jumlah gedung negara yang terbangun pada akhir tahun 2015 : 57%.

D. Meningkatnya Penyediaan Rumah dan Kawasan Permukiman yang Berbasis Kawasan Layak Huni.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya penyediaan Perumahan dan Permukiman yang berbasis Kawasan Layak Huni	Persentase Perumahan Layak Huni dan Kawasan Permukiman	74,11	74,05	99,91

Definisi Undang – Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa Perumahan adalah Kumpulan Rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Gambaran pencapaian Pelayanan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2. 3 berikut ini.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman
Tahun 2011-2015 Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Peraturan Daerah RTRW				2	9	8	-	1	2	9	8	-	1	1,0	1,0	1,0		1,0
2	Dokumen RTR kawasan strategis				2	5	0	-	0	2	5	-	-	0	1,0	1,0	-		
3	Dokumen RDTR dan Zoning Regulation				2	0	2	0	1	2	-	2	0	1	1,0	-	1,0		1,0
4	Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang				1	0	5	7	9	1	-	5	7	9	1,0	-	1,0	1,0	1,0
5	Panjang jalan yang di bangun				25	38	29	26	24	25	38	29	26	24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Panjang Jalan yang di rehab				1035	1027	1025	1143	1143	1.035	1.027	1.025	1143	1143	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7	Panjang jembatan yang dibangun				0	165	9	16	165	-	165	9	16	165		1,0	1,0	1,0	1,0
8	Panjang jembatan yang direhab				134	203	192	174	145	134	203	192	174	145	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	Jumlah bangunan gedung				2	4	1	1	12	2	4	1	1	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

No.	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	negara yang dibangun																		
14	Jumlah bangunan gedung negara yang rehab/retrofit				1	4	0	2	0	1	4	-	2	0	1,0	1,0	-	1,0	
15	Jumlah rumah negara yang terbangun				0	0	0	3	7	-	-	-	3	7	-	-	-	1,0	1,0
16	Jumlah rumah negara yang rehab				0	1	0	1	2	-	1	-	1	2	1,0	-	1,0		1,0
17	Pembangunan Rumah Layak Huni				0	0	1795	1180	525	-	-	1.795	1180	525	-	1,0	1,0	1,0	1,0
18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman (APBN)				16	11	14	11	10	16	11	14	11	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19	Penataan Revitalisasi kawasan tradisional / sejarah, RTH,				6	5	2	0	5	6	5	2	0	5	1,0	1,0	1,0		1,0
20	Jumlah Sambungan Rumah Terpasing				50000	50000	50000	60000	75723	50.000	50.000	50.000	60000	75723	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

No.	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
21	Instalasi Pengolahan air limbah (IPAL) skala kota yang di bangun				1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1,0	1,0	-		
22	Instalasi Pengolahan air limbah (IPAL) skala kawasan yang di bangun				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23	Instalasi Pengolahan air limbah (IPAL) setempat/komunal yang di bangun (sanimas, SLBM)				4	4	8	-	18	4	4	8	-	18	1,0	1,0	1,0		1,0
24	Luasan Daerah Genangan yang ditanggulangi dengan sistem drainase primer				3	2	2	1	0	3	2	2	1	0	1,0	1,0	1,0	1,0	
25	Pembangunan TPA Regional				2	0	0	0	0	2	-	-	0	0	1,0	-	-		
26	Pembangunan TPA Lokal					2	1	3	3		2	1	3	3		1,0	1,0	1,0	1,0
27	Pembangunan sarana pengolahan sampah				7	9	13	-	3	7	9	13	-	3	1,0	1,0	1,0		1,0

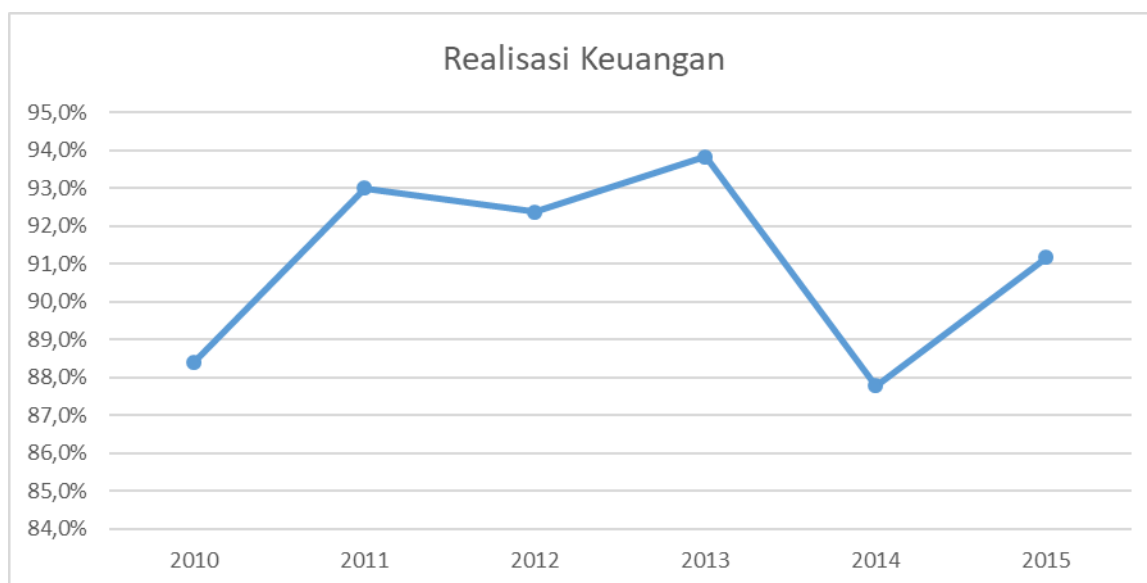
**Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Prasar Tarkim
Prov. Sumatera Barat Tahun 2010-2015**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Rasio antara	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program pelayanan administrasi perkantoran	1.760,45	2.322	2.843	3.684	4.140	4.207	1.380,51	2.198	2.535	3.071	3.888	4.025	0,78	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	495,30	1.937	2.488	3.365	4.807	3.147	492,12	1.886	2.381	3.284	4.645	3.009	0,99	
Program peningkatan disiplin aparatur	245,00	265	266	218	201	269	219,80	261	215	212	198	268	0,90	
Program fasilitasi purna tugas pns			663						663					
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	70,05	145	542	500	205	230	40,21	142	537	469	201	216	0,57	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	652,78	754	1.214	1.870	1.875	1.558	642,95	747	1.198	1.778	1.649	1.516	0,98	
Program pembangunan sarana pendidikan	18.836,54						17.289,77						0,92	
Program pembangunan jalan dan jembatan propinsi & strategis provinsi	204.896,34	209.441	264.833	244.816	327.932	305.555	201.090,65	194.113	257.494	241.937	319.610	287.212	0,98	
Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	28.771,44	28.771	45.875	52.578	54.920	64.329	28.740,08	27.153	45.827	52.550	54.626	60.190	1,00	
Program peningkatan sarana dan prasarana ke pu-an			1.338	1.800	2.305	2.830			1.331	1.793	2.244	2.823		
Program pengembangan sistem pengelolaan air minum dan air limbah	4.628,01	20.905	20.163	17.043	16.171	3.726	4.516,09	19.103	18.817	16.503	16.150	3.698	0,98	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Rasio antara	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2
(1) Program penataan bangunan dan lingkungan	(2) 52.402,5 ₄	(3) 53.790	(4) 62.806	(5) 47.580	(6) 53.376	(7) 117.73 ₇	(8) 32.697,9 ₁	(9) 50.404	(10) 56.192	(11) 44.650	(12) 34.564	(13) 112.52 ₆	(14) 0,62	(15) 0,62
Program bimbingan teknis peningkatan jasa konstruksi	352,15	691	1.076	3.600	3.328	1.761	304,12	586	959	3.492	2.921	1.691	0,86	0,86
Program peningkatan kerja pengelolaan persampahan dan drainase	1.293,72	3.145	5.393	3.896	5.915	5.685	1.049,45	2.561	4.244	2.933	5.262	4.475	0,81	0,81
Program percepatan sanitasi permukiman (ppsp)						200						50		
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	12.898,4 ₅	1.162	24.759	620			12.221	880	20.250	524			0,95	0,95
Program pengembangan perumahan	394,82	1.065	1.468	1.100	1.659	1.197	359,0	1.026	1.355	964	1.620	1.011	0,91	0,91
Program pemberdayaan komunitas perumahan			11.560	14.390	13.609	4.494			11.035	14.177	12.413	4.444		
Program perencanaan penataan ruang	509,66	1.526	3.307	2.772	1.986	4.610	464,06	1.523	3.132	2.715	1.944	4.587	0,91	0,91
Program pengaturan dan pengawasan penataan ruang					369	361					363	358		
Program pembinaan penataan ruang				625	991	385				603	925	374		
Program pengendalian pemanfaatan ruang	192,91	1.222	306				189,51	1.168	258				0,98	0,98
Program pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam (bnpb)	225.987, ₃₂						201.125						0,89	0,89
Urusan otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan		300	275	400	203,375	220		281	266	375	153	211		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (dalam Juta Rupiah)						Rasio antara	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2
(1) daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tabel diatas menunjukkan fluktuasi anggaran sepanjang kurun waktu 2010-2015 pada masing-masing program. Hal ini disebabkan adanya program yang baru muncul ataupun dihilangkan sesuai dengan tingkat prioritas program dan kondisi eksisting. Rata-rata realisasi keuangan tertinggi berada pada Tahun 2011 yaitu sebesar 93% sementara realisasi terendah ada pada tahun 2014. Untuk lebih lengkap rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Prasjaltarkim Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada gambar berikut.



Rasio Realisasi dan Anggaran Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010-2015

Pada Tahun 2014 Realisasi Keuangan Dinas Prasarantarkim mencapai angka 88%. Angka ini turun cukup drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai 94%.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam menyusun strategi digunakan analisis dengan melihat tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

2.4.1. Kekuatan (Strenght)

Berdasarkan SK Gubernur Sumbar. No: 600-903.1-2015 Tgl 18 Desember 2015, total panjang ruas jalan provinsi adal 1525 km yang terbagi sebagai berikut :

Tabel Ruas Jalan Provinsi
Berdasarkan SK Gubernur Sumbar. No: 600-903.1-2015
Tgl 18 Desember 2015

NO	KODE RUAS		NAMA RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN		
	NO. RUAS	SFX			ASPAL	BETON / TANAH	BELUM TEMBUS
1	007		Simancung - Tj. Ampalu	11,08	11,08		
2	008		Tj. Ampalu - Sijunjung	20,00	20,00		
3	010		Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru	29,00	29,00		
4	011		Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu	11,90	11,90		
5	012		Simp. Koto Baru - Junction	5,40	5,40		
6	018		Indera Pura - Muara Sakai	7,30	7,30		
7	025		Manggopoh - Padang Luar	69,43	69,43		
8	028		Sicincin - Kurai Taji	16,44	16,44		
9	031		Panti - Simpang Empat	74,23	74,23		
10	033		Simpang Empat - Sasak	20,00	20,00		
11	034	2	Air Balam - Air Bangis	12,60	12,60		
12	035		Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang)	18,50	18,50		
13	036		Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa)	28,79	28,79		
14	037		Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	10,40	10,40		
15	038		Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	30,60	30,60		
16	039		Guguk Cino - Sitangkai	15,12	15,12		
17	040		Sitangkai - Tj. Ampalu	17,28	17,28		
18	044		Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai	50,61	50,61		
19	054		Junction - Abai siat	12,60	12,60		
20	055		Sijunjung - Tanah Badantung	4,40	4,40		
21	056	1	Simp. Padang Aro - Lubuk Malako	20,00	20,00		
22	056	2	Lubuk Malako - Abai Sangir	17,00	17,00		
23	056	3	Abai Sangir - Sei. Dareh	74,00	14,53	59,48	

NO	KODE RUAS		NAMA RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN		
	NO. RUAS	SFX			ASPAL	BETON / TANAH	BELUM TEMBUS
24	068		Padang Sawah - Kumpulan	36,50	36,50		
25	069	2	Bts. Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	46,85	46,85		
26	070		Batusangkar - Ombilin	18,51	18,51		
27	071		Solok - Alahan Panjang	47,80	47,80		
28	072		Lubuk Basung - Sungai Limau	30,90	30,90		
29	073		Pasar Baru - Alahan Panjang	49,40	23,84	25,56	
30	075		Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman	20,50	20,50		
31	076		Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	73,95	58,95	15,00	
32	078		Simpang Koto Mambang - Balingka	39,40	39,40		
33	079		Simpang Baso - Piladang	11,14	11,14		
34	080		Matur - Palembang	20,70	20,70		
35	081		Palembayan - Palupuh (Simp. Patai)	13,30	13,30		
36	082		Alahan Panjang - Kiliran Jao	72,90	17,05	25,83	30,03
37	083		Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	44,10	1,31	30,19	12,60
38	084		Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh)	14,17	14,17		
39	085		Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (TPA Regional)	2,05	2,05		
40	086		Surantih - Kayu Aro - Langgai	27,70	4,50	13,20	10,00
41	087		Duku - Sicincin	28,65	0,00	18,65	10,00
42	088		Padang Koto Gadang - Palembang	31,00	31,00		
43	089		Jl. Balingka - Terowongan - Ngarai Sianok	9,70	9,70		
44	090		Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi	25,00	13,00	12,00	
45	091		Simpang Napar - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	23,00	5,00	18,00	
46	092		Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani	28,40	28,40		
47	093		Singkarak - Aripin - Tj. Balit - Padang Ganting	30,00	27,00	3,00	
48	094		Pintu Angin - Labuah	5,50	3,00	2,50	

NO	KODE RUAS		NAMA RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN		
	NO. RUAS	SFX			ASPAL	BETON / TANAH	BELUM TEMBUS
			Saiyo				
49	095		Rao - Rokan (Batas Riau)	33,00	33,00		
50	096		Lubuk Sikaping - Talu	28,00	7,00	21,00	
51	097		Bungo Tanjung - Teluk Tapang	43,20	2,50	40,70	
52	098		Teluk Bayur - Nipah - Purus	12,00	3,00	8,80	0,20
53	099		Purus - Bandara International Minangkabau	16,00			16,00
54	100		Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	1,20	1,20		
55	101		Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	47,00	3,00	38,00	6,00
56	102		Rawang - Talawi	6,00	6,00		
57	103		Simp. SP II - Kantor Camat	5,10		5,10	
58	104		Kantor Camat - Berkat	5,90		5,90	
TOTAL PANJANG JALAN PROVINSI				1525,20	1097,5	342,90	84,83

Sementara itu, selain dilakukan peningkatan dan pembangunan, setiap tahunnya juga dilakukan program Rehabilitasi dan Pemeliharaan rutin atas ruas jalan provinsi yang ada. Adapun ruas jalan provinsi yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan adalah sepanjang 1117 km.

- Telah tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat serta dokumen perencanaan lainnya sebagai acuan makro perencanaan pembangunan terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur.
- Sumatera Barat memiliki potensi sumber air minum yang baik, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan air minum dan bersih di masyarakat.
- Untuk meningkatkan mutu konstruksi dan lingkungan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah tersedia laboratorium konstruksi dan lingkungan yang telah terakreditasi nasional.

- Tersedianya pelatihan dan sertifikasi bidang jasa konstruksi bagi masyarakat pekerja konstruksi.

2.4.2. Kelemahan (Weakness)

- Masih banyaknya titik kemacetan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan, Demikian pula jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan, seperti kawasan strategis, kawasan wisata, kawasan industri, pelabuhan laut (outlet) dan pelabuhan udara serta pasar-pasar tumpah yang masih mengalami kemacetan.
- Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil pada Jalan provinsi.
- Masih adanya sejumlah bangunan pemerintahan yang belum selesai dibangun pasca gempa September 2009
- Adanya kendala dalam pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.
- Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (*Sistem Sewerage*)

2.4.3. Peluang (Opportunity)

- Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan wilayah yang cerdas dan dimanifestasikan dalam pengembangan smart village, smart city, serta koridor super yang dapat menciptakan manfaat sosial yang tinggi bagi masyarakat.
- Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultasi dan perlindungan lingkungan.
- Adanya teknologi konstruksi yang ramah gempa
- Tersedianya kesempatan tugas belajar untuk meningkatkan pendidikan formal.

2.4.4. Ancaman (Threats)

- Pertumbuhan penduduk Sumatera Barat, yang berdasarkan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,34%. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat ini berimplikasi pada kebutuhan akan pelayanan publik terutama di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kementerian PUPera, bahwa peningkatan jumlah penduduk juga secara tidak berdampak pada eksploitasi sumberdaya alam sehingga dibutuhkan perencanaan tata ruang yang dapat mendukung daya tampung lingkungan dan berkelanjutan.
- Letak geografis Sumatera Barat berada pada daerah tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Euroasia dengan topografi berbukit, bergunung dengan kelerengan di atas 10 % dan curah hujan yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan sebahagian besar wilayah Sumatera Barat rawan terhadap bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, kekeringan dan bencana lainnya.
- Belum meratanya aksesibilitas pelayanan jaringan jalan antara bagian utara dan selatan di provinsi Sumatera Barat dan jalan menuju provinsi tetangga.
- Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan dalam Pengelolaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Internal :

- a. Terbatasnya sumberdaya manusia di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terutama tenaga teknis.
- b. Keterbatasan data dan informasi terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain baik secara vertikal dengan Kementerian Pusat/pemerintah daerah, maupun secara horizontal dengan OPD lain di Provinsi Sumatera Barat dalam pembangunan infrastuktur di Sumatera Barat.

Eksternal :

- a. Belum sinerginya penanganan antara jalan nasional, jalan provinsi dan jalan Kabupaten/Kota karena adanya pemisahan tegas dalam Undang Undang Jalan yang menyebabkan terkotak-kotaknya program penanganan jalan.
- b. Belum terpenuhinya persyaratan minimum untuk lebar dan kualitas struktur jalan berkaitan dengan volume serta beban muatan gandar yang melewati standar
- c. Banyaknya lokasi rawan longsor, amblas, banjir.
- d. Besarnya biaya penanganan jalan akibat topografi yang berada di daerah perbukitan/pegunungan.
- e. Masih adanya bangunan gedung pemerintah yang harus dibangun kembali atau direnovasi pasca gempa 30 September 2009
- f. Belum sinerginya pembangunan SPAM regional baik kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- g. Rendahnya pelayanan air limbah regional.
- h. Kurangnya komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang.
- i. Lemahnya penegakan hukum dalam pelaksanaan penataan ruang sesuai UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
- j. Lemahnya fungsi koordinasi penataan ruang
- k. Belum tersedianya Standar, Pedoman dan Manual (SPM) Bidang Penataan Ruang

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Barat.

3.2.1 Visi

Visi Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 merupakan visi kepala daerah terpilih yang merupakan kondisi objektif yang akan diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang.

VISI Gubernur Sumatera Barat yaitu :

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

Sedangkan Misi Gubernur Sumatera Barat yaitu :

1. *Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";*
2. *Meningkatkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;*
3. *Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;*
4. *Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadi Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat;*
5. *Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.*

Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Misi ke 5 **Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**. Seiring dengan harapan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk mampu mengefektifkan visi pembangunan sumbar tahun 2016 - 2021 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan.

Sesuai dengan misi 5 tersebut, ada beberapa isu strategis terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana/infrastruktur serta pelayanan transportasi publik
- Melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelestarian lingkungan

3.2.2 Agenda dan Prioritas Pembangunan RPJMD Prov. Sumatera Barat

Agenda dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

1. Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi
7. Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan
8. Penurunan Tingkat kemiskinan, Pengangguran, Daerah Tertinggal
9. Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

3.2.3 Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Terpilih

Adapun peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pencapaian Visi, Misi Gubernur sangat erat. Sesuai dengan Misi Gubernur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ikut berperan terhadap pencapaian Misi ke -5 yaitu **Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**, meskipun secara tidak langsung juga berperan terhadap pencapaian misi lainnya seperti pada Misi ke 4 yaitu Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif, Berdaya Saing Regional dan Global, dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Daerah. Pada Misi ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi turut berperan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana destinasi pariwisata serta dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.

Dalam mencapai misi Gubernur tersebut ada beberapa faktor yang dapat menghambat ataupun mendorong tercapainya misi tersebut. Pelimpahan jalan kabupaten/kota ke provinsi melalui SK Jalan Provinsi Tahun 2015 mengakibatkan menurunnya persentase kemantapan jalan provinsi. Sementara itu, Jalan merupakan faktor penting dalam mendukung aksesibilitas dan pembangunan. Jalan yang mantap merupakan pengungkit atau katalisator bagi pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa visi Kementrian PUPR adalah :

Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk mencapai visi tersebut, Kementrian PUPR memiliki 5 visi, dimana 3 diantaranya terkait dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera

Barat. Yaitu :

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- b. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
- c. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

3.4 Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Dalam Renstra Kementrian Agraria dan Tata Ruang (Kementrian ATR) Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa tujuan utama Kementerian ATR adalah memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan unntuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan tujuan itu, rumusan sasaran strategis Kementerian ATR yang terkait dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

- a. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
- b. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)

Penyelenggaraan pentaaan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan perbatasan negara

termasuk pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang Penataan Ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, rencana Detail Tata Ruang, fasilitasi dpenyediaan peta skala 1:5000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS.

3.5 Keterkaitan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sumatera Barat dengan Visi dan Misi Kementerian PUPR dan Kementerian ATR

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya merupakan turunan dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh bidang Bina Marga, Cipta Karya, dan UPTD ;sementara tupoksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang di turunkan pada tupoksi Bidang Tata Ruang.

3.6 Telaahan RTRW Provinsi Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat disebutkan bahwa pengembangan prasarana wilayah dengan dukungan infratsruktur dilakukan dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan, dengan pola rang sebagai berikut :

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan Provinsi Sumatera Barat
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah
3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan
5. Penetapan dan Peningkatan Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan, dan Simpang Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan

provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro, dan Tuapejat untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan

6. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah
7. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan
8. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah

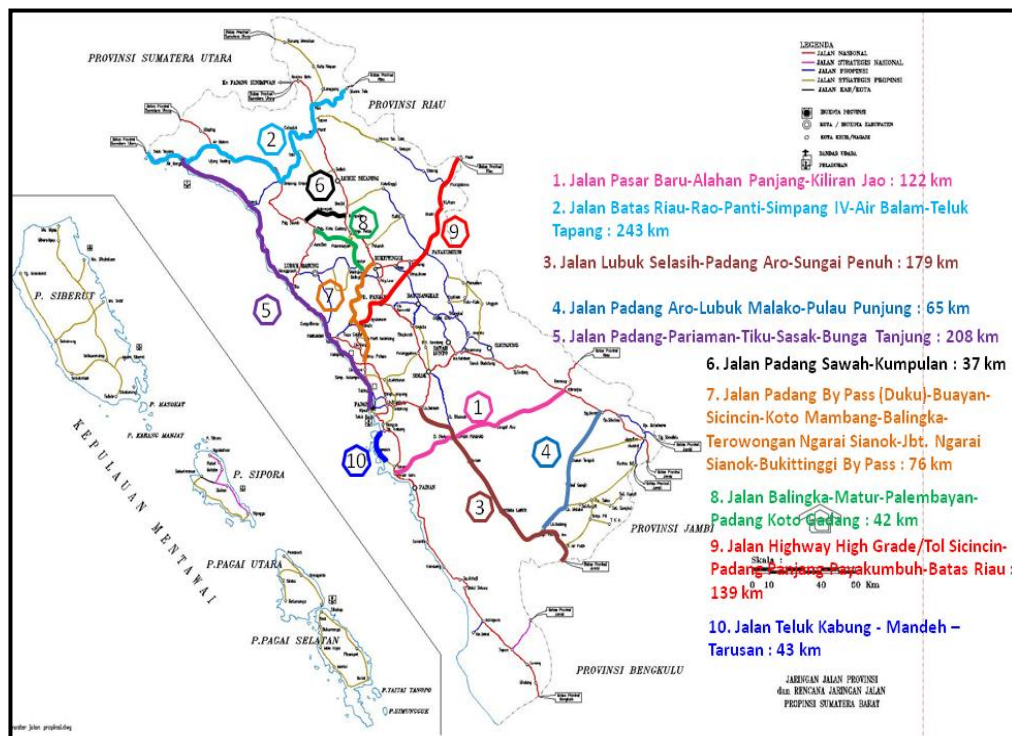
Hubungan antara Kabupaten Kota dibentuk dengan sistem jaringan jalan antara Provinsi (Jalan Nasional) dan antara Kabupaten/Kota (Jalan Provinsi) serta di lingkungan Kabupaten/Kota itu sendiri (Jalan Kabupaten/Kota) Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi telah terhubung dengan 18 Ibu Kota Kabupaten/Kota.



Gambar 3. 1 Peta Gagasan Pembentukan Struktur Ruang

Pembentukan Struktur Ruang didasari atas pola jaringan jalan yang telah ada, maka untuk pengembangan prasarana wilayah perlu dibangun/ditingkatkan dan beberapa ruas jalan antara lain :

1. Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya: Ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang-Kiliran Jao.
2. Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Batas Riau: Ruas Jalan Batas Riau-Panti-Simpang Empat-Air Balam-Teluk Tapang.
3. Peningkatan Daya Dukung Jalan dari Kabupaten Solok menuju Kabupaten Solok Selatan dan Perbatasan Provinsi Jambi: Ruas Jalan Lubuk Selasih-Padang Aro-Sungai Penuh.
4. Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya : Ruas Jalan Padang Aro-Lubuk Malako-Pulau Punjung.
5. Perkuatan sistem jaringan jalan Kota Padang-Pariaman-Tiku-Sasak-Bunga Tanjung.
6. Peningkatan Jalan Padang Sawah-Kumpulan
7. Penambahan kapasitas jaringan jalan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi: Ruas Padang By Pass-Buayan-Sicincin-Koto Mambang-Balingka-Ngarai Sianok-Jembatan Ngarai Sianok-Bukittinggi By Pass.
8. Penambahan Kapasitas Jalan Balingka-Matur-Palembayan-Padang Koto Gadang Kabupaten Agam.
9. Peningkatan kapasitas jalan mendukung pola pengembangan perdagangan dan pertanian, dan perkebunan : Ruas Bukittinggi-Payakumbuh-Batas Riau termasuk penyelesaian Jembatan Kelok 9.
10. Pembangunan Jalan antara Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan : Ruas Jalan Teluk Kabung-Mandeh-Tarusan.



Gambar 3. 2 Peta Pembangunan/Peningkatan Jalan Strategis

3.7 Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dilakukan berdasarkan faktor-faktor pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan implikasi KLHS bagi pelayanan OPD; serta disesuaikan dengan cita-cota dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta peluang dan ancaman yang mungkin terjadi dalam 5 tahun mendatang.

Berdasarkan faktor tersebut diatas, dilakukan skoring terhadap isu-isu yang dihadapi dalam pengelolaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan mempertimbangkan :

- Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra OPD; K/L; serta pencapaian sasaran strategis dalam RPJMD
- Merupakan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD
- Berdampak besar pada publik

- d. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
- e. Kemudahan untuk menangani
- f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, ada beberapa isu strategis dalam pengelolaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sebagai berikut :

- Persentase kemantapan jalan provinsi yang turun menjadi 68% pada Tahun 2015 sebagai akibat penambahan ruas jalan Provinsi sesuai SK Jalan Tahun 2015. Persentase ini jauh dibawah persentase kemantapan jalan nasional yaitu sebesar 86% pada Tahun 2015.
- Belum selesainya proses rekonstruksi dan pembangunan sejumlah gedung pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, beberapa bangunan strategis, rumah negara dan tempat evakuasi sementara (shelter). Perkembangan teknologi bangunan yang semakin maju memungkinkan penerapan bangunan ramah gempa sebagai bentuk antisipasi atas ancaman gempa bumi.
- Sebagaimana menjadi target dalam universal access, target capaian nasional untuk air minum dan rumah tangga bersanitasi masing-masing adalah 100%. Wilayah Sumatera Barat sendiri secara umum baru dapat mengakses layanan air minum sebesar 68% dan rumah tangga bersanitasi sebesar 66,84% (Tahun 2015). Ketertinggalan pelayanan ini juga diperburuk dengan pertumbuhan penduduk yang jauh melebihi pertumbuhan ketersediaan sarana prasarana, terutama air minum dan sanitasi.
- Seiring dengan perkembangan pembangunan di Sumatera Barat serta adanya program Nawacita mengakibatkan terjadinya dinamika pembangunan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat yang tidak terakomodir di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PUPR yang baik, bersih, dan profesional
- b) Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
- c) Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan

Adapun sasaran yang perlu dicapai demi tercapainya tujuan tersebut antara lain :

- a) Meningkatnya tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Dinas PUPR mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.

b) Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

c) Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat

Adapun prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan meliputi penyediaan Bangunan Gedung Pemerintah, Rumah Negara dan Bangunan Strategis Lainnya yang aman dan nyaman serta untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi .

d) Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung.

Tercapainya kinerja penataan ruang yang tinggi seperti yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 dan UU No. 26 Tahun 2007.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	
				1	2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PUPR yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB
			Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	95%	96%
2	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	70%	71%
			Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	5 unit
		Persentase cakupan air minum		69%	70%
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	72%	73%	
3	Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang	1,2%	1,35%
				80%	81%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut.

Sasaran 1 Meningkatnya tata kelola organisasi

Untuk meningkatkan tata kelola organisasi dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel Strategi dan Kebijakan Sasaran 1

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi	Penyampaian dokumen perencanaan (Renstra, RKT, dan Perjanjian Kinerja) dan pelaporan organisasi dengan tepat waktu
		Peningkatan kualitas pelaporan kinerja organisasi
2	Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Penyediaan data kepegawaian yang akurat
		Peningkatan layanan administrasi kepegawaian
		Peningkatan pengelolaan sarana prasarana
3	Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan
		Peningkatan kesesuaian pertanggungjawaban

No	Strategi	Kebijakan
		keuangan dengan aturan
4	Meningkatkan pengawasan internal organisasi	Peningkatan tindak lanjut temuan pemeriksaan
		Meningkatnya pejabat ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN

Sasaran 2 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel Strategi dan Kebijakan Sasaran 2

No	Strategi	Kebijakan
1	Pengurangan jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir	Pembangunan jalan yang belum terhubung antar daerah terisolir
2	Meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan	Pembangunan jalan menuju daerah wisata dan pelabuhan udara/laut
3	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan
		Peningkatan jalan

Sasaran 3 Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel Strategi dan Kebijakan Sasaran 3

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan penyediaan bangunan gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis lainnya yang aman dan nyaman	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis
		Pemeriksaan laik fungsi oleh tim ahli bangunan gedung (TABG)
		Peningkatan kualitas tenaga teknis
2	Meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi	Pembangunan infrastruktur air minum
		Pembangunan infrastruktur sanitasi

Sasaran 4 Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung

Untuk meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel Strategi dan Kebijakan Sasaran 4

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan RTR yang berkekuatan hukum	Pengkajian dan penyempurnaan RTRW, RDTR dan PZ
		Penyediaan dikumen RTRW, RDTR dan PZ
		Penyediaan data spasial
2	Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR	Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pembinaan pemanfaatan ruang
		Peningkatan kuantitas PPNS Tata Ruang

Tabel 4. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD 2016-2021

Visi	<i>Mewujudkan Infrastruktur yang handal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</i>
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pelayanan jaringan jalan yang mantap dan berwawasan lingkungan 2. Mewujudkan penataan bangunan yang aman dan nyaman. 3. Mewujudkan pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi 4. Menciptakan penataan ruang yang berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	
Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PUPR yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi	Penyampaian RKT, dan Pelaporan organisasi dan Peningkatan organisasi
		Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Penyediaan Peningkatan Peningkatan
		Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan	Peningkatan Peningkatan keuangan de
		Meningkatkan pengawasan internal organisasi	Peningkatan Meningkatkan LHKPN/LHK
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Pengurangan jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir	Pembangunan daerah teris
		Meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan	Pembangunan pelabuhan u
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan	Rehabilitasi Peningkatan
	Meningkatnya ketersediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan	Meningkatkan penyediaan bangunan gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis lainnya yang aman dan nyaman	Pembangunan pemerintah, strategis Pemeriksaan gedung (TA

Tujuan	Sasaran	Strategi	
			Peningkatan
		Meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi	Pembangunan
			Pembangunan
Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Meningkatkan RTR yang berkekuatan hukum	Pengkajian dan PZ
			Penyediaan
		Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR	Penyediaan
			Terlaksananya pembinaan p
			Peningkatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG PROV.
SUMATERA BARAT
TAHUN 2016 - 2021

Untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dengan mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian renstra 2016 - 2021 dilandasi dengan Indikator Kinerja maka dilakukan penyusunan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Pendanaan sebagai berikut:

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan supir kantor
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
- Penyediaan Jasa Sopir Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
- Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Reformasi Birokrasi
- Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi
- Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- Pembangunan Fasilitas Penunjang Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang Sumatera Barat
- Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- Renovasi Rumah Dinas Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Sumatera Barat

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD
- Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
- Penatausahaan Keuangan OPD
- Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat

6. Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi, dengan kegiatan :

- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan
- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman
- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Solok dan Kota Solok
- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh
- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat
- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Sijunjung dan Kab. Dhamasraya
- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Tanah Datar dan Kota Sawahlunto
- Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah-I
- Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah-II
- Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah-III
- Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah-IV
- Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Agam dan Kota Bukittinggi
- Pembangunan Jalan Provinsi dan di Wilayah Kab. Solok Selatan
- Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi DAK (Pendamping)
- Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab. Kep. Mentawai
- Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi
- Perencanaan Pembangunan Jalan Provinsi
- Perencanaan Pembangunan Jembatan Provinsi
- Penyusunan Database dan Survey Jalan dan Jembatan Provinsi
- Penyusunan Buku Dokumen Leger Jalan dan Jembatan Provinsi
- Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi
- Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat
- Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi

- Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum
- Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan/jembatan dan infrastruktur strategis
- Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Jalan / Jembatan Provinsi
- Survey Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simancung - Tj. Ampalu (P.007)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tj. Ampalu - Sijunjung (P.008)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru (P.010)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu (P.011)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Koto Baru - Junction (P.012)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Indera Pura - Muara Sakai (P.018)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sicincin - Kurai Taji (P.028)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Empat - Sasak (P.033)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Air Balam - Air Bangis (P.034.2)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang) (P.035)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa) (P.036)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino (P.037)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sitangkai (P.039)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sitangkai - Tj. Ampalu (P.040)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai (P.044)
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Junction - Abai siat (P.054)

- Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sijunjung - Tanah Badantung (P.055)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Malako - Abai Sangir (P.056.2)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Sawah - Kumpulan (P.068)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bts. Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi (P.069.2)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin (P.070)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Solok - Alahan Panjang (P.071)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Baso - Piladang (P.079)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Matur - Palembang (P.080)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Simp. Patai) (P.081)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan (P.083)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (TPA Regional) (P.085)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Duku - Sicincin (P.087)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088)

- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jl. Balingka - Terowongan - Ngarai Sianok (P.089)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi (P.090)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Napar - Bukit Bual - Tanjung Ampalu (P.091)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani (P.092)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pintu Angin - Labuah Saiyo (P.094)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rao - Rokan (Batas Riau) (P.095)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Sikaping - Talu (P.096)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bungo Tanjung - Teluk Tapang (P.097)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah - Purus (P.098)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Purus - Bandara International Minangkabau (P.099)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan (P.100)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rawang - Talawi (P.102)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. SP II - Kantor Camat (P.103)
- Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104)
- Pembangunan Jembatan Lolong (P. 099)
- Pembangunan Jembatan Ngalau Ami (P.073)
- Pembangunan Jembatan Sei Batu Bala (P.086)
- Pembangunan Jembatan Aia Janiah (P.073)
- Pembangunan Jembatan Lurah Batang Nyalo (P.073)
- Pembangunan Jembatan Bateh (P.071)
- Pembangunan Jembatan Linggar Jati
- Pembangunan Jembatan Kandis
- Pembangunan Jembatan Muaro Aia 1 (P.073)
- Pembangunan Jembatan Batang Basi (P.071)
- Pembangunan Jembatan Kayu Aro (P.071)
- Pembangunan Jembatan Rimbo Data (P.071)

- Pembangunan Jembatan Ulak Karang
- Pembangunan Jembatan Sei. Kayu Gadang (P.086)
- Pembangunan Jembatan Sei. Kayu Aro (P.086)
- Pembangunan Jembatan Lubuk Gadang (P.088)
- Pembangunan Jembatan Lubuk Gadang II (P.088)
- Pembangunan Jembatan Beringin (P.080)
- Pembangunan Jembatan Sungai Guntuang (P.081)
- Pembangunan Jembatan Sungai Taleh (P.080)
- Pembangunan Jembatan Bateh Aka (P.088)
- Pembangunan Jembatan Kalulutan (P.072)
- Pembangunan Jembatan Duku (P.081)
- Pembangunan Jembatan Sei. Puar 1 (P.080)
- Pembangunan Jembatan Batang Dadok (P.090)
- Pembangunan Jembatan Gantiang (P.090)
- Pembangunan Jembatan Sei. Puar (P.080)
- Pembangunan Jembatan Tengah (P.090)
- Pembangunan Jembatan Kaciak (P.080)
- Pembangunan Jembatan Tiku (P.072)
- Pembangunan Jembatan Sungai Ibung 1 (P.095)
- Pembangunan Jembatan Batang Bio (P.033)
- Pembangunan Jembatan Batang Pigogah (P.097)
- Pembangunan Jembatan Sei. Pinang (P.097)
- Pembangunan Jembatan Batang Tomak (P.097)
- Pembangunan Jembatan Batang Pisang Hutan (P.033)
- Pembangunan Jembatan Sungai Ibung 2 (P.095)
- Pembangunan Jembatan Lubuk Pandan (P.069,2)
- Pembangunan Jembatan Titian Sambung (P.069,2)
- Pembangunan Jembatan Batang Sopan (P.076)
- Pembangunan Jembatan Sungai Batang (P.076)
- Pembangunan Jembatan Tenggian (P.076)
- Pembangunan Jembatan Sungai Bincang (P.076)
- Pembangunan Jembatan Sungai Golang (P.076)
- Pembangunan Jembatan Galonggang (P.056,3)
- Pembangunan Jembatan Batang Surian (P.044)
- Pembangunan Jembatan Batang Sitapus (P.056,3)
- Pembangunan Jembatan Batang Palo (P.056,3)
- Pembangunan Jembatan Batang Jujuan (P.056,3)
- Pembangunan Jembatan Viaduct (P.007)

7. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi, dengan kegiatan :

- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Pasaman dan Pasaman Barat
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Pasaman
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Panti - Simpang Empat
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Rao - Rokan (Bts.Riau)
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Talu - Lubuk - Sikaping
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Pasaman Barat
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Panti - Simpang Empat
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Simpang IV - Sasak
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Air Balam - Air Bangis
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Bungo Tanjung - Teluk Tapang - Bts. Sumut
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Padang Sawah - Kumpulan
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Bukittinggi dan Agam Timur
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Simpang Koto Mambang - Balingka
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Simpang Baso - Piladang
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Balingka - Terowongan - Ngarai Sianok
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Agam
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Matur - Palembang
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Sp. Patai)
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Palupuh - Puagadih - Koto Tinggi
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Pangkalan - Koto Baru - Sialang - Gelugur

- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Jln Lingkar Selatan (Payakumbuh)
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Kubu Kerambil - Batusangkar
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Baso - Batusangkar
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Guguk Cino
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Batas Sawahlunto (Lap. Segitiga)
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sitangkai
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Batas Kota Payakumbuh - Sitangkai
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Sicincin - Kurai Taji
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Simpang Duku (Ketaping) - Pariaman
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah - Purus
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Koto Mambang - Balingka
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Solok dan Kota Solok
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Singkarak - Aripah - Tj. Balit - Pdg Ganting
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Pintu Angin - Lubuk Saiyo
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Sp Ganting Payo - Batas Solok - Sumani
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Rawang - Talawi
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Solok Selatan
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Aro - Lubuk Malako

- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Lubuk Malako - Abai Sangir
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Solok - Alahan Panjang
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Simancung - Tj. Ampalu
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Bts. Sitangkai - Tj. Ampalu
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Sijunjung - Tn. Badantung
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Tj. Ampalu - Sijunjung
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Sp. Sikabau - Sp. Koto Baru
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Sp. Koto Baru - Tj. Simalidu
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Sp. Koto Baru - Junction
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Junction - Abai Siat
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Sp. Napar - Bukit Bual - Tj. Ampalu
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Pesisir Selatan dan Keb. Kepulauan Mentawai
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Inderapura - Muara Sakai
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Simp. SP II - Kantor Camat
- Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat
- Pemeliharaan Khusus Jalan Propinsi Rute Tour de Singkarak
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Propinsi dan Bangunan Pelengkap Jalan
- Penanganan Kondisi Kritis Jalan dan Jembatan Provinsi

- Pengendalian Pelaksanaan Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan
- Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan
- Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan
- Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Bidang Peralatan dan Bahan Jalan Provinsi Sumatera Barat
- Paket Penyusunan Buku Dokumen Leger Jalan dan Jembatan Propinsi
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah I
- Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah II

8. Peningkatan sarana dan prasarana ke Binamargaan, dengan kegiatan:

- Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Laboratorium ke Binamargaan
- Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Laboratorium ke Binamargaan
- Monitoring Pengendalian Mutu UPTD

9. Peningkatan dan pengembangan jasa kontruksi, dengan kegiatan :

- Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jasa Konstruksi
- Kegiatan Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi
- Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi
- Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu
- Penyusunan Ranperda SMK3
- Penyusunan Perda SMM dan SMK 3
- Profil Jasa Konstruksi
- Sertifikasi Ahli Muda
- Kegiatan Update Profil Jasa Konstruksi

10. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/kota, dengan kegiatan :

- Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan
- Pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat
- Pembangunan Asrama Mahasiswa Minang Yogyakarta
- Pembangunan Prasasti APDN Lama
- Dukungan Penyelenggaraan Hari Pers Nasional
- Pembangunan Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Rekonstruksi Bangunan Pasca I
- Pembangunan Gedung ESDM Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pembangunan Gedung Pemberdayaan Wanita & KB Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pembangunan Gedung DPKD (Samsat)
- Pembangunan Gedung Badan Ketahanan Pangan (Lanjutan)
- Retrofit Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pengadaan Interior dan Furniture Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara
- Pembangunan Gedung UPTD Balai Koperasi Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pembangunan Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan (Lanjutan)
- Pembangunan Gedung Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan)
- Pembangunan Gedung Pengendali Inflasi Bukittinggi
- Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di

Sumatera Barat

- Pembangunan Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Pengadaan Interior dan Furniture Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Tambahan Garase Rumah Dinas Gubernur
- Pembangunan Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Pembangunan dan Interior Guest House Gubernur
- Pembangunan Gedung Mess VVIP di Bukittinggi
- Pembangunan Kembali Rumah Dinas TNI AD (Lanjutan)
- Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara
- Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Linggarjati
- Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Bukit Putus Painan
- Paket Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Pasir Baru Pilubang Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman
- Paket Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami SDN 12 Ulakan Tapakis Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman
- Paket Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami MTsN Darul Hikmah Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat
- Paket Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami SDN 2 Maligi Kec. Ranah Pasisia Kab. Pasaman Barat
- Penyempurnaan Shelter Evakuasi Tsunami SMA 1 Sutra Kab. Pesisir Selatan
- Lokarkarya, Sosialisasi, Forum Komunikasi dan Informasi Bangunan Gedung
- Kampanye Edukasi Publik dan PIP2B Sosialisasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara
- Pembinaan Pengelolaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)
- Asesmen Bangunan Gedung
- Penyusunan informasi tentang Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi

dan Bahan Bangunan Prov. Sumbar

- Pembuatan/Penggandaan Buku-Buku Informasi Kecipta Karya
- Pelatihan Tenaga Terampil Keciptakarya
- Pelaksanaan Pameran Produk Kecipta Karya
- Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Teknis dan Advokasi Serta Tersedianya Data Informasi Teknis Bidang Kecipta Karya

11. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota

- Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakarya dan Kebinamargaan di Provinsi Sumatera Barat
- Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat
- Workshop dan Pelatihan Air Minum Provinsi Sumatera Barat
- Penyusunan Database Keciptakarya berbasis spasial (Sektor air minum dan sanitasi) di Prov. Sumatera Barat
- Penyusunan Rencana SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat
- Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Regional di Prov. Sumatera Barat

12. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dengan kegiatan :

- Pendampingan program Sanimas IDB dan PPSP
- Percepatan Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)
- Pemetaan Kebutuhan dan Ketersediaan MCK yang Layak di Lingkungan Sekolah Se- Sumatera Barat
- Fasilitasi penyusunan Masterplan Sanitasi Kab/Kota
- Penyusunan studi kelayakan IPAL regional

13. Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi

- Pembangunan Drainase di Ruas Jalan Provinsi
- Survey Drainase lintas kabupaten/kota

14. Perencanaan penataan ruang

- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
- Penyusunan RTR Kawasan Rawan Bencana
- Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Sumatera Barat
- Pendampingan Revisi RTRW kabupaten/kota
- Pembangunan fisik kawasan rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
- Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat
- legalisasi Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat
- Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi
- legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi |(KSP)
- Bantuan teknis penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota
- Penyusunan Sistem Informasi KePUan dan Tata Ruang Provinsi/kabupaten/kota
- Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang
- Penyebarluasan informasi dan komunikasi penataan ruang
- Fasilitasi legalisasi rencana rinci tata ruang kabupaten/kota
- Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan terhadap Penataan Ruang
- Operasional BKPRD Provinsi Sumatera Barat

15. Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang

- Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota
- Pengawasan teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumatera Barat
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

16. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi

6.2. Indikator Kinerja

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Target indikator kinerja pada Renstra Tahun 2016 – 2021 ditetapkan menyesuaikan dengan prioritas, sumber daya manusia serta kemampuan anggaran yang tersedia. Berikut uraian target indikator kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat :

a. Kemantapan jalan provinsi

Kemantapan jalan dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai kondisi minimal dari suatu ruas jalan yg diharapkan dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kemantapan jalan adalah :

- i. Kondisi jalan (Baik / sedang / rusak ringan / rusak berat)
- ii. Parameter kapasitas dan volume jalan (macet / tidak macet)
- iii. Parameter lebar jalan (standar minimal lebar jalan)

Adapun baseline kondisi kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2015 adalah 91,13%. Namun dengan adanya perubahan SK mengenai Ruas Jalan Provinsi Sumatera Barat mengakibatkan adanya penambahan jalan sehingga pada Tahun 2016 target kemantapan jalan provinsi adalah 69% dengan target akhir 75%. Penetapan target ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada pada tahun dasar, isu-isu strategis, prioritas kebutuhan, serta ketersediaan anggaran.

b. Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan

Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan terbangun (siap ditempati), yang terdiri atas bangunan strategis, gedung negara dan rumah negara.

c. Persentase cakupan air minum

Rata-rata perbandingan jumlah penduduk terlayani air minum di kabupaten/kota dibandingkan jumlah penduduk kabupaten/kota kali 100%.

d. Persentase cakupan sanitasi

Rata-rata perbandingan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi di kabupaten/kota dibandingkan jumlah rumah tangga kabupaten/kota kali 100%.

e. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang

Jumlah kesesuaian program rencana pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan program RTRW Provinsi Sumatera Barat dikalikan 100%

6.3. Pendanaan Indikatif

Dalam proses penyusunan program, kegiatan, lokasi dan pendanaan indikatif yang termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5.1) disusun berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Tahun 2010 – 2015, proyeksi kebutuhan dan target yang akan dicapai, serta skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun program dan kegiatan bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan perubahan yang terjadi selama tahun pelaksanaan Renstra.

Dalam pelaksanaannya, pendanaan dalam kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersumber dari alokasi dana APBD, APBN dan PHLN. Secara lebih lengkap program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja OPD menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai mana pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	BB	BB	BB
	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	94.5%	95%	96%	97%	97%	97%
2	Persentase Jalan Mantap	91,13% / 69%	70%	71%	72%	73%	73%
	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	22 unit	15%	30%	50%	65%	80%
		22 unit	5 unit	8 unit	8 unit	3 unit	5 unit
	Persentase cakupan air minum	68%	69%	70%	75%	80%	80%
	Persentase cakupan sanitasi	66,84%	72%	73%	75%	78%	78%
3	Kesesuaian rencana pembangunan dan rencana tata ruang	79%	1,2%	1,35%	1,41%	1,48%	1,48%
			80%	81%	82%	83%	83%

Rencana strategis ini adalah Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Lima Tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dan target – target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun kedepan.

Dokumen ini mencakup jangka waktu rentang tahun 2016 - 2021 sesuai dengan masa kerja Gubernur dan sesuai juga dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun dan pada saat masa transisi yaitu pada tahun 2017 Dokumen Renstra ini dapat dipergunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja 2017, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang termuat dalam RPJP-Daerah 2010-2025 dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM - Nasional maupun dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, berkurangnya kawasan kumuh, berkurangnya rumah tidak layak huni, meningkatnya cakupan layanan air minum, tersedianya TPA Sampah Regional, keterpaduan antar daerah/wilayah perbatasan Provinsi, menumbuh kembangkan kegiatan pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah serta perluasan akses sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing Provinsi Sumatera Barat.

Demikian penyusunan dokumen ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.